**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**BPKAD PROVINSI JAWA BARAT**

* 1. **Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur**

**2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Susunan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 45 Tahun 2017 berimplikasi pada tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja pada BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 79 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Unit dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Jawa Barat. BPKAD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan dan pengamanan di bidang keuangan dan BMD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKAD Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

* 1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah, penatausahaan barang daerah;
  2. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah, penatausahaan barang daerah;
  3. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah, penatausahaan barang daerah.
  4. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa kebutuhan daerah;
  5. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
  6. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.
  8. Melakukan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan APBD

**2.1.2 Struktur Organisasi**

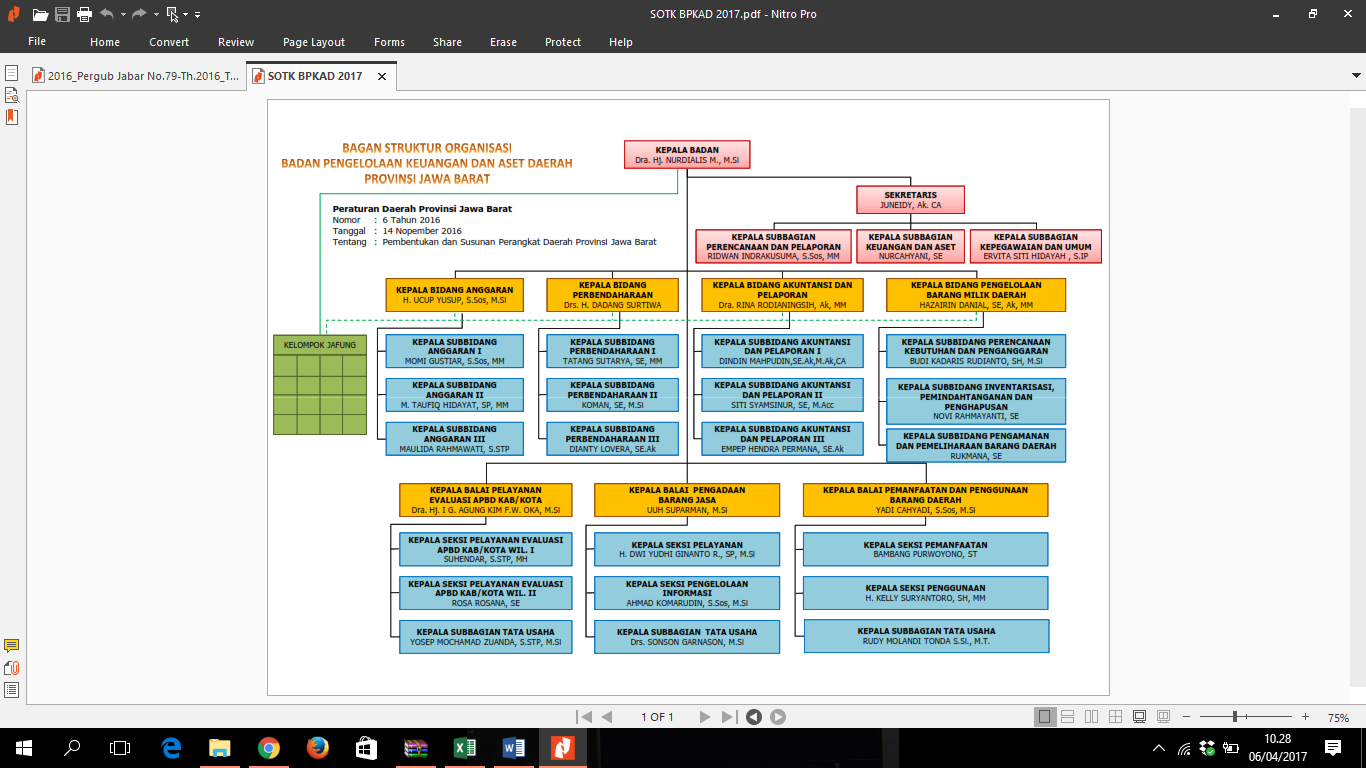
Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berdampak pada Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Perubahan susunan organisasi tersebut di atas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Jawa Barat, yang menggambarkan bahwa susunan organisasi BPKAD Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang dan 3 (tiga) kepala bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) kepala seksi dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan;
   2. Sub Bidang Keuangan dan Aset; dan
   3. Sub Bidang Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Anggaran, membawahi:
   1. Sub bidang Anggaran I;
   2. Sub bidang Anggaran II; dan
   3. Sub bidang Anggaran III.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
   1. Sub bidang Perbendaharaan I;
   2. Sub bidang Perbendaharaan II; dan
   3. Sub bidang Perbendaharaan III.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
   1. Sub bidang Akuntansi dan Pelaporan I;
   2. Sub bidang Akuntansi dan Pelaporan II; dan
   3. Sub bidang Akuntansi dan Pelaporan III.
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
   1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
   2. Subbidang Inventarisasi, Pemindahtanganan, dan Penghapusan; dan
   3. Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah.
7. Balai Pelayanan Evaluasi APBD, membawahi:
   1. Seksi Pelayanan Evaluasi APBD Wil I.
   2. Seksi Pelayanan Evaluasi APBD Wil II.
   3. Kasubag TU.
8. Balai Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
   1. Seksi Pelayanan.
   2. Seksi Pengelolaan informasi.
   3. Kasubag TU.
9. Balai Pemanfaatan dan penggunaan BMD, membawahi:
   1. Seksi Pemanfaatan.
   2. Seksi Penggunaan.
   3. Kasubag TU.

Secara umum struktur organisasi BPKAD dapat digambarkan dengan bagan berikut:

**Bagan 2.1**

**Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Barat**

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing bidang dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD**

| **NO** | **JABATAN** | **TUGAS POKOK** | **FUNGSI** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Kepala** | Memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset Daerah, yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. | 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; 2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi; 3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan 4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
| **2** | **Sekretariat** | Menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, penatausahaan PPK-PPKD serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang. | 1. Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; 2. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum; 3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan ; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. |
| **3** | **Bidang Anggaran** | Menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, aspek anggaran, meliputi anggaran I, anggaran II serta anggaran III | 1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang anggaran; 2. penyelenggaraan pengelolaan anggaran; 3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan 4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
| **4** | **Bidang Perbendaharaan** | menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, aspek perbendaharaan meliputi perbendaharaan I, perbendaharaan II dan perbendaharaan III | 1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan; 2. penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan; 3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan 4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya |
| **5** | **Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan** | menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, aspek akuntansi dan pelaporan, meliputi akuntansi dan pelaporan I, akuntansi dan pelaporan II serta akuntansi dan pelaporan III | 1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan; 2. penyelenggaraan pengelolaan akuntansi dan pelaporan; 3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan 4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya |
| **6** | **Kepala Bidang Pengelolaan BMD** | menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan barang milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, inventarisasi, pemindahtanganan dan penghapusan serta pengamanan dan pemeliharaan barang Daerah | 1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik Daerah; 2. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah; 3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan 4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
| **7** | **Kepala Balai Evaluasi APBD** | menyelenggarakan sebagian tugas teknis penunjang di bidang pelayanan evaluasi APBD Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah I dan pelayanan evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | 1. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan evaluasi APBD Kabupaten/Kota ; 2. penyelenggaraan pelayanan evaluasi APBD Kabupaten/Kota meliputi pelayanan evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah I dan pelayanan evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II; 3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan 4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
| **8** | **Kepala Balai Pengadaan Barang/Jasa** | menyelenggarakan sebagian tugas teknis penunjang di bidang pengadaan barang jasa, meliputi pelayanan dan pengelolaan informasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Barang Jasa. | 1. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis barang jasa; 2. penyelenggaraan fasilitasi pengadaan barang jasa meliputi pelayanan dan pengelolaan informasi; 3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan 4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
| **9** | **Kepala Balai Pemanfaatan & Penggunaan BMD** | menyelenggarakan sebagian tugas teknis penunjang di bidang pemanfaatan dan penggunaan barang Daerah, meliputi pemanfaatan dan penggunaan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Daerah | 1. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pemanfaatan dan penggunaan barang Daerah; penyelenggaraan pemanfaatan dan penggunaan barang Daerah meliputi pemanfaatan dan penggunaan; 2. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan 3. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya |

**2.2 Sumber Daya SKPD**

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPKAD Provinsi Jawa Barat sampai dengan April 2017 sebanyak 192 orang, dengan komposisi 1 orang Kepala Badan, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Balai, 18 orang Kasub bidang, 166 orang Pelaksana, dengan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 2.2**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

**BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pangkat/golongan** | **Jumlah** |
| 1. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 orang |
| 2. | Pembina Tk. I (IV/b) | 5 orang |
| 3. | Pembina (IV/a) | 7 orang |
| 4. | Penata Tk. I (III/d) | 19 orang |
| 5. | Penata (III/c) | 34 orang |
| 6. | Penata Muda Tk. I (III/b) | 49 orang |
| 7. | Penata Muda (III/a) | 2 orang |
| 8. | Pengatur Tk. I (II/d) | 5 orang |
| 9. | Pengatur (II/c) | 28 orang |
| 10. | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 13 orang |
| 11. | Pengatur Muda (II/a) | 3 orang |
| **Jumlah** | | **192** |

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Barat

**Tabel 2.3**

**Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan**

**BPKAD Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pendidikan Formal** | **Jumlah** |
| 1. | Doktor (S3) | 1 orang |
| 2. | Magister (S2) | 38 orang |
| 3. | Sarjana (S1) | 87 orang |
| 4. | Diploma III | 9 orang |
| 5. | Diploma I | 1 orang |
| 6. | SMA | 53 orang |
| 7. | SMP | 2 orang |
| 8. | SD | 1 orang |
| **Jumlah** | | **192 orang** |

Sumber : Bagian Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Barat

**Tabel 2.4**

**Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor**

**BPKAD Provinsi Jawa Barat**

**Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Barang** | **Satuan** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| 1 | Stand Speaker | Unit | 2 | Baik |
| 2 | Mix wireless | Unit | 8 | Baik |
| 3 | Speaker | Unit | 2 | Baik |
| 4 | Multi Player | Unit | 1 | Baik |
| 5 | Sub Aktif | Unit | 1 | Baik |
| 6 | Power AMP | Unit | 1 | Baik |
| 7 | Filling Kabinet | Unit | 40 | Baik |
| 8 | Scanner | Unit | 24 | Baik |
| 9 | Rak Arsip | Unit | 8 | Baik |
| 230x100x36 |
| 10 | Rak Arsip | Unit | 8 | Baik |
| 180x100x36 |
| 11 | Rak Arsip | Unit | 8 | Baik |
| 120x100x36 |
| 12 | Televisi Samsung | Unit | 8 | Baik |
| 13 | Note Book HP | Unit | 8 | Baik |
| 14 | Kamera | Unit | 3 | Baik |
| 15 | Komputer PC | Unit | 164 | Baik |
| 16 | Mesin Penghancur Kertas | Unit | 8 | Baik |
| 17 | Sofa | Unit | 8 | Baik |
| 18 | Kendaraan Roda Empat | Unit | 28 | Baik |
| 19 | Kendaraan Roda Dua | Unit | 100 | Baik |

Sumber : Pengurus Barang di BPKAD Provinsi Jawa Barat

**2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD**

BPKAD Provinsi Jawa Barat merupakan SKPD baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 2017. Maka kinerja pelayanan pada tahun sebelumnya dilakukan oleh Biro Pengelolaan Keuangan dan Biro Pengelolaan aset Daerah dan dilakukan dengan bekerjasama dengan SKPD lain.

Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Instansi yang bertanggung jawab didalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan yang di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan suatu indikator kinerja seperti yang jelaskan pada tabel dibawah.

**Tabel 2.5**

**Target Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | Indikator Kinerja | Target SPM | Capaian Target Indikator 2017 | Target Renstra Tahun Ke | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | Rasio Capaian Tahun Ke | |
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | Perda dan Pergub APBD/APBD Perubahan Tepat Waktu | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 100% |
| 2 | Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota tepat waktu | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 100% |
| 3 | Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan pembinaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Prosentase SP2D yang diterbitkan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Tingkat akurasi input data dan rekonsiliasi data keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 100% |
| 7 | Opini BPK – WTP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Tersusunnya dan Terpenuhinya Kebutuhan Aset Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Tingkat akurasi input Aset Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Aset Tanah Yang tersertifikasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | pengamanan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Aset Yang Dimanfaatkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Terselenggaranya Pembinaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD**

Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2018 perlu memperhatikan dan menganalisa kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun kebelakang.

**Tabel 2.6**

**Analisa Faktor Internal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelemahan**  **Faktor Internal** | **No.** | **Kekuatan**  **Faktor Internal** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. | Standarisasi beban kerja  Sarana prasarana yang sudah  tidak memadai  Pengembangan dan pemanfaatan ATISISBADA disetiap OPD belum optimal  SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi personil OPD dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan BMD belum dimiliki  Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel  Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan  Masih adanya aset di SKPD yang belum dioptimalkan  Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan asset serat perencanaan  Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset belum jelas  Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah  Belum tegasnya sanksi terhadap kelalaian dalam jual beli aset daerah  Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Posisi organisasi baru yang lebih kuat dan independen  Kualitas SDM Internal organisasi  Komitmen pimpinan dan karyawan yang Tinggi  Organisasi di isi oleh SDM yang sudah berpengalaman  Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel  Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah.  Sertifikasi keahlian aparatur. |

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi tahun ke depan dari mulai tahun 2017-2018.

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2017-2018, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**

**Peluang dan Tantangan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | **Peluang Faktor Ekternal** | No. | **Tantangan Faktor Eksternal** |
| 1.  2.  3.  4. | Peran BPKAD yang strategis  Mudah berkoordinasi dengan pusat  Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan asset yang masih bisa dikembangkan  Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah  Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam  meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah. | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. | Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan asset di OPD  Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;  Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat  Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah  Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatya jumlah paket pengadaan barang dan jasa  Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance  Penerapan system akuntansi berbasis accrual  Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK  Fasilitas pengelola barang yang belum memadai  Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa  Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat |